

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAFTAR KE 1191/PER-UMP/2011
PAGAR ALAM 29-03-2011

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN UNTUK
MENILAI KINERJA PEMERINTAHAN
KOTA PAGAR ALAM**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : JULI HARTINI
NIM : 22 2006 012

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**



**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN RASIO KEUANGAN UNTUK
MENILAI KINERJA PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**NAMA : JULI HARTINI
NIM : 22 2006 012**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULI HARTINI

Nim : 22 2006 012

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, ... Februari ... 2011

Penulis



JULI HARTINI

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL :ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN RASIO
KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Nama :JULI HARTINI
NIM : 22 2006 012
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok :Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal :28.3.2011

Pembimbing I,

Pembimbing II

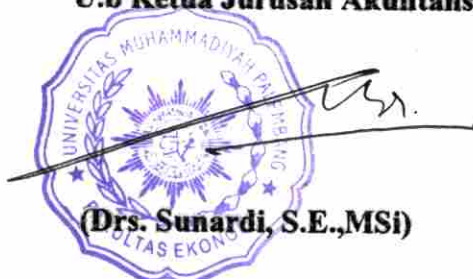


(Drs. Sunardi, S.E., M.Si)



(M. Fahmi, SE., M.Si)

Mengetahui,
Dekan
U.b Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, S.E., M.Si)

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

*USAHA TANPA DOA ADALAH SOMBONG, DOA TANPA USAHA
ADALAH BOHONG BERUSAHA DAN BERDOALAH UNTUK
HIDUPMU. SELANGKAH ENKAU DEKAT DENGAN-NYA
SERIBU DIA DEKAT DENGANMU*

(Juli Hartini)

Terucap Syukur Padamu Allah SWT,

Kupersembahkan kepada :

- ↓ Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- ↓ Saudara-saudaraku Tersayang*
- ↓ Sahabat-sahabatku*
- ↓ Pembimbing Skipsi*
- ↓ Almamater*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayanya serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan menggunakan Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam " yang merupakan salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan ku sayangi yang telah mendukung secara material maupun spiritual, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs Surnadi, SE,.M.Si dan Bapak M.Fahmi SE,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:



1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si dan Ibu Welly, SE. M.Si selaku Ketua, Pembimbing Akademik dan Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan, staf dan karyawan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi rawas yang telah memberi bantuan data maupun keterangan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibuku tercinta (Jasarman dan Nilaiyanti)
7. Saudara-saudaraku tercinta (Alisantro-MimiNurhayati,Popi ali hernita,riko Riswanto,Ria miharti, dan keponakan rehgi,rezki,M.Naufal Asis dan M.Najib Akhar).
8. Sahabat-sahabatku (Ijonk, Agus Hardianto, Davidsol, Era, Ari,Vegy, Susy, Iin,erni,yansa,yeta,dismi dan apri) yang telah memberikan dukungannya, teman-teman KKN angkatan XXXIII Desa Karang Agung Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim serta teman-teman mahasiswa Akuntansi khususnya angkatan 2006.
9. Semua pihak yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal ibadah yang telah dilakukan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatu

Palembang, 26.3 2011

Penulis



Juli Hartini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. PENELITIAN SEBELUMNYA.....	7

B. LANDASAN TEORI.....	8
1. Rasio Keuangan.....	8
a. Pengertian Rasio Keuangan.....	8
b. Tujuan Rasio Keuangan.....	9
c. Manfaat Rasio Keuangan.....	9
d. Jenis – jenis Rasio Keuangan.....	10
e. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio.....	13
2. Anggaran.....	14
3. Unsur-unsur APBD.....	16
4. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	19
a. Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan.....	19
b. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	20
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	20
d. Aspek yang diukur dalam kinerja	20
e. Teknik dan Metode Penukuran Kinerja	21
f. Hubungan Rasio Keuangan dengan Kinerja.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. jenis Penelitian.....	23
B. Tempat Penelitian.....	23
C. Operasionalisasi Variabel.....	24
D. Data Yang Diperlukan.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25

F. Analisis Data Dan Teknis Analisis.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.....	4
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel.....	24
Tabel IV. I Data Realisasi Selisih Anggaran Kota Pagar Alam	51
Tabel IV. 2 Data PAD dan dana Perimbangan pada APBD tahun 2006-2009	53
Tabel IV. 3 Data Biaya, Target, Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam	55
Tabel IV. 4 Data Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2006-2009.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keterangan Selesai Riset dari Dinas Kota Pagar Alam

Lampiran 2 : kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Sertifikat Lulus Membaca AL-Quran

Lampiran 4 : Sertifikat Test TOEFL

Lampiran 5 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Juli Hartini 22 2006 012/ Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah kota pagar alam

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah dengan menggunakan rasio keuangan pada Dinas Pendapatan Kota Pagar Alam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Kota Pagar Alam sebagai masukan dan pertimbangan mengenai perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas pendapatan Kota Pagar Alam untuk rasio kemandiriannya belum cukup baik dikarena mengalami penurunan antara lain tahun 2006 sebesar 3,2, tahun 2007 sebesar 4,2%, tahun 2008 sebesar 4,3% dan tahun 2009 sebesar 3,6%. Untuk rasio efektivitas menunjukkan hasil yang cukup baik karena telah memenuhi standar yang telah ditetapkan antara lain pada, tahun 2006 sebesar 127,6%, tahun 2007 sebesar 133,4%, tahun 2008 sebesar 134,1% dan tahun 2009 sebesar 139,7%, untuk rasio efisiensi sudah cukup baik yaitu pada tahun 2006 sebesar 0,6%, tahun 2007 sebesar 0,8%, tahun 2008 sebesar 0,7%, dan tahun 2009 sebesar 0,6%. Aktivitas Kota Pagar Alam sebagian dana yang dimiliki pemerintah untuk belanja rutin semakin meningkat dan untuk belanja pembangunan dari tahun ke tahun semakin menurun. Kontribusi sumber-sumber pendapatan pemerintah sudah cukup baik dikarenakan hasil perhitungan menunjukkan lebih dari 2,5% antara lain tahun 2006 sebesar 16,24%, tahun 2007 sebesar 27,14%, tahun 2008 sebesar 49,76%, dan tahun 2009 sebesar 51,99%. Untuk APBD pemerintah Kota Pagar Alam mengalami pertumbuhan yang baik dan menunjukkan hasil yang positif.

Kata Kunci: Pendapatan Belanja daerah Untuk menilai Kinerja

ABSTRACT

Juli Harlin / 22 2006 012 / Analysis Of Local Government Revenues and Expenditures Using Financial Ratios to Appraised Financial Performance At Service Revenues Pagaram City.

The Problem formulation in this writing of this study is how the financial performance of the revenue budget expenditures by using financial ratios at the service revenues Pagaram city. The technique of collecting data in this study was documentation. This research is use in service revenues Pagaram city as input and considerations regarding the calculation of financial ratios to assess financial performance. The method of analysis this study used in were quantitative and qualitative analysis.

The result showed that the Office of the service revenues Pagaram city for independence has not been good enough ratio caused decreased among others in 2006 by 3.2%, in 2007 by 4.2%, in 2008 by 4.3% and 3.6% in 2009. For effectiveness ratio showed a better result because it has meta predetermined standard, among others, in 2006 amounted to 127,6%, in 2007 amounted to 133,4%, in 2008 amounted to 134,1% and in 2009 amounted to 139,7%, for the efficiency ratio was good enough that in 2006 amounted to 0,6%, 0,8% in 2007, the year 2008 by 0,7%, and in 2009 by 0,6%. Activity of Pagaram City partly owned by government funds for routine expenditures increased and for development spending from year to year decreases. The contribution of government revenue sources was good enough because the calculation result showed more than 2,5% among others in 2006 amounted to 16,24%, in 2007 was 27,14%, in 2008 was 49,76%, and in 2009 by 51,99%. For local government revenues and expenditures Pagaram city has been good growth and showed positive results.

Keywords : Local government revenues and expenditures



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah juga didukung oleh sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah. Hal pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah harus diperhatikan, sehingga pendapatan asli daerah semakin terasa kontribusinya yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan .

Selain pembangunan nasional yang diutamakan, pembangunan daerah juga perlu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan konsisten guna tercapai peningkatan pendapatan daerah. mengingat pendapatan daerah sumber utama pembiayaan pembangunan daerah perlu diperhatikan dalam pencapaian penerimaannya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang direvisi nomor 32 tahun 2004 yang berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga UU tersebut sering disebut UU

otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri.

Adapun dibentuknya daerah otonom yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan agar dapat berfungsi secara efektif dan tercapainya tujuan pembentukan daerah otonom, maka kepala daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya, salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, meliputi: pemungutan sumber-sumber pendapatan, penyelenggaraan, pengurus, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, penetapan APBD dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 04 peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang berlaku serta harus diimbangi dengan sejauh mana sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan keuangan yang adil, rasional transparan, partipasi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Untuk mengelola sumber daya keuangan, pemerintah daerah harus lebih tanggap dan mengerti karena dalam perekonomian moderen laporan keuangan daerah sudah merupakan

media penting yang sering dipakai untuk kondisi kesehatan lembaga ataupun dinas dan pemerintahan dimana laporan keuangan ini menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta pertumbuhan posisi keuangan suatu dinas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan hanya mampu memberikan informasi yang bersifat non moneter tidak dapat secara langsung disajikan dalam laporan keuangan. Jika kita membutuhkannya maka dicari dari sumber lain atau dengan mendapatkan informasi yang lebih optimal melalui analisa rasio keuangan atau dengan bantuan alat-alat analisis. Dengan diketahuinya kondisi keuangan keputusan rasional dapat dibuat.

Analisa rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua jenis perbandingan yaitu pertama, analisis membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang. Kedua analisis dapat membandingkan rasio dinas pendapatan daerah lainya yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan. Rasio keuangan dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang dapat dikelompokkan menjadi : Rasio Kemandirian (otonomi fiskal). Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian. (Abdul Halim, 200:232)

Berikut ini adalah tabel realisasi APBD dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun anggaran 2006-2009.

Tabel 1.1
Data Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Kota Pagar Alam
Tahun 2006-2009 (Dalam Jutaan)

No	Keterangan	2006	2007	2008	2009
1	Pendapatan daerah				
	PAD	12.798,32	25.845,45	29.504,97	31.877,97
	Dana Perimbangan	391.744,97	465.562,42	684.610,57	879.877,92
	Lain-lain				
	Pendapatan yang sah	11.943,00	7.814,00	48.133,32	40.814,53
	Total pendapatan daerah	416.437,29	499.221,87	762.248,86	952.025,18
2	Belanja Daerah				
	Belanja Operasi	60.337,11	120.563,87	393.593,70	485.026,43
	Belanja Modal	310.252,64	302.793,65	393.779,24	446.783,64
	Belanja tak terduga	965,42	363,78	551,61	1.085,52
	Total Belanja	371,595,17	423,994,36	709,924,55	932,895,59

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 2010

Dalam hal ini analisis penggunaan rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah kota Pagar Alam masih sangat terbatas. Hal tersebut yang sifat dan cukup berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan penyusunan anggaran sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing

komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkat persentase tertentu. Oleh karena sering disusun dengan pendekatan secara incremental budget maka sering kali mengabaikan rasio keuangan APBD, namun menurut pasal 20 PP nomor 105, APBD seharusnya disusun berdasarkan pendekatan kinerja (performance budget),.

Oleh karena itu rasio keuangan sangat berpengaruh dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan dinas pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Pemerintahan Kota Pagar Alam.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Rasio Keuangan APBD untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Pagaralam tahun 2006- 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui rasio keuangan APBD tahun 2006-2009 dalam menilai kinerja pemerintah Kota Pagar Alam Khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan penulis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mengetahui manfaat dan kegunaan rasio keuangan untuk menilai kinerja pada instansi pemerintah.

b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan kota pagar alam dan Aset

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja kota pagar alam

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul "analisa rasio keuangan pada dinas pendapatan Daerah Kabupaten banyuasin untuk menilai efektifitas dan efisiensi pendapatan Daerah" (Yuri Afendri,2009). Perumusan masalah adalah Apakah Dinas pendapatan Daerah kabupaten banyuasin pendapatan daerahnya sudah efektif dan efisiensi. Adapun tujuan adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi dinas daerah kabupaten Banyuasin dalam merialisasikan pendapatan daerahnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan beberapa perhitungan rasio dan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis angka-angka hasil perhitungan sesuai dengan masalah yang akan di bahas dalam analisis kuantitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa rasio rata-rata efektifitas dan efisiensi Dinas pendapatan Daerah kabupaten banyuasin menggambarkan kinerja yang baik karena sudah mencapai target minimal 1 atau 100% untuk rasio efektivitas, hanya pada tahun 2005 rasio efektivitasnya belum memenuhi target karena yang ditetapkan terlalu tinggi dan objek pajak tidak bertambah serta banyak perusahaan yang terlambat membayar pajak rasio efisiensi sudah baik mencapai target <1 atau $<100\%$ untuk rasio efisiensinya.

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang persamaan adalah menghitung rasio keuangan, objek yang diteliti adalah anggaran dan sama-sama menggunakan anggaran dinas kota. Perbedaan adalah penelitian sebelumnya meralisasikan pendapatan pada dinas dan pertanggungjawaban, sedangkan penelitian sekarang menilai kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian, menilai kinerja kota Pagar Alam

B. Landasan Teori

1. Rasio keuangan

a. Pengertian rasio keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harapan (2008:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan adalah hubungan matematika antara jumlah-jumlah dilaporkan keuangan yang digunakan untuk mengkuantifikasikan berbagai karakteristik kinerja perusahaan (Stice, dkk 2005: 949).

Analisa rasio keuangan adalah analisis dengan jalan membandingkan satu pos laporan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna menghubungi antara pos tertentu (Jumingan, 2005:)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah analisis yang membandingkan pos laporan keuangan

satu dengan laporan keuangan lainnya berguna untuk mengetahui penilaian posisi atau kondisi suatu perusahaan atau instansi saat ini.

b. Tujuan rasio keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harapan (2008:297) tujuan rasio keuangan adalah menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Tujuan rasio keuangan untuk mendekteksi kesehatan suatu perusahaan maupun pemerintahan dari problem-problem yang sedang dihadapi (Kuswadi, 2006:2).

Berdasarkan tujuan rasio keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dalam prestasi untuk mencapai kemajuan dalam perusahaan maupun pemerintah.

c. Manfaat rasio keuangan

Manfaat rasio keuangan adalah untuk mengetahui kondisi keuangan, perumusan dalam mengambil keputusan yang rasional dan juga keuangan yang bermanfaat dalam memberikan pandangan yang lebih tentang kondisi keuangan dan prestasi suatu lembaga maupun perusahaan.

Menurut sofyan Syafri Harapan (2008:297) Manfaat rasio keuangan adalah menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. dengan menyederhanakan ini kita dapat menilai secara cepat antara pos dan

dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Berdasarkan informasi rasio keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat rasio keuangan adalah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam mengambil keputusan rasional.

d. Jenis-jenis rasio keuangan

Menurut Abdul Halim (2007:231) penggunaan analisis rasio pada sektor khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukuran. Meskipun demikian, dalam rangka mengelolah keuangan daerah yang transparan,jujur,demokratis, efektif,efisien dan akuntabel,analisa rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan dimiliki swasta. Analisa rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintahan daerah lainnya.

Berikut ini adalah beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara lain:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah adalah membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Menurut Kadjatmiko (2001:10) suatu daerah dikatakan mandiri apabila rasio kemandiriannya mencapai minimal >50% jadi kemandirian suatu daerah terhadap dana asli daerahnya minimal harus lebih besar dari 50%.

2) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Cara memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio ini perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang

dacapai <1 atau <100%. Semakin kecil rasio efesiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efesensi atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

3) Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekenomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap Anggaran} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$



$$\text{Rasio Belanja Terhadap Anggaran} = \frac{\text{Total Belanja Bangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besar rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang masih relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio

Menurut Sofyan Syafri Harapan (2008:298) keunggulan analisa rasio dibandingkan teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah:

- 1) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- 2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
- 3) Mengetahui posisi perusahaan yang di tengah industri lain.
- 4) Bermanfaat dalam model mengambil keputusan.
- 5) Menstandarisasi perusahaan.
- 6) Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain.

- 7) Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa datang.

Adapun keterbatasan analisis rasio adalah:

- 1) Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat dan dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya.
- 2) Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik seperti:
 - a) Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan ini banyak mengandung taksiran dan *judgment* yang dapat dinilai bias dan subjektif.
 - b) Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan (*cots*) bukan harga pasar.
 - c) Klasifikasi dalam laporan keuangan bias berdampak pada angka rasio.
 - d) Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda.
- 3) Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio.
- 4) Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron.
- 5) Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan.

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan suatu anggaran daerah, dimana anggaran merupakan proses sistem pengendalian. Anggaran merupakan salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut anggaran. menurut Mardiasmo (2002:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anggaran (budget) merupakan hasil yang diperoleh setelah tugas perencanaan (Abdul Halim, 200:172) penganggaran (budgeting) menunjukan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana sampai pada akhirnya pada tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil melakukan rencana. Anggaran adalah rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. Anggaran adalah rencana manajemen, dengan asumsi implisit bahwa anggaran untuk membuat kegiatan nyata berkaitan dengan rencana.

Dalam UU No.33 Tahun 2004 yang dimaksudkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan,

APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai anggaran yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Unsur-unsur APBD

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin normatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri dari atas tiga. Adapun unsur-unsur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan, meliputi:

1) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan yang terdiri dari:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Dearah



- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
- Adapun dana perimbangan terdiri dari:
- a) Dana bagi hasil pajak
 - b) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
 - c) Dana alokasi umum
 - d) Dana alokasi khusus
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari :
- a) Dana penanggulangan bencana alam
 - b) Bagi hasil pajak dari provinsi
 - c) Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - d) Dana penyesuaian tunjangan pendidikan
 - e) Lain-lain pendapatan yang sah
- b. Belanja meliputi:
1. Meliputi belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.
- Kelompok belanja operasi terdiri dari :
- a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang

- c) Belanja subsidi
 - d) Belanja hibah
 - e) Belanja bantuan social
 - f) Belanja bantuan keuangan
2. belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Belanja modal terdiri dari :
- a) Belanja tanah
 - b) Belanja peralatan dan mesin
 - c) Belanja modal gedung dan bangunan
 - d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
 - e) Belanja aset tetap lainnya
 - f) Belanja aset lainnya
3. Belanja tidak terduga kelompok belanja lain-lain tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan wewenang pemerintah pusat atau daerah.

Belanja aparat daerah atau belanja rutin diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan serta belanja modal. Belanja pelayanan publik atau belanja pembangunan dikelompokkan

menjadi tiga yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi, belanja pemeliharaan dan belanja modal.

4) Pembiayaan meliputi:

a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas daerah. Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri atas jenis pembiayaan seperti berikut :

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- (2) Pencarian dana cadangan
- (3) Penerimaan pinjaman daerah
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- (5) Penerimaan piutang daerah
- (6) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

b) Pengeluaran pembiayaan /Pengeluaran daerah adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah terdiri atas jenis pembiayaan berikut :

- (1) Pembentukan dana cadangan
- (2) Penyertaan modal (investasi pemerintah daerah)
- (3) Pembayaran pokok
- (4) Pemberian pinjaman daerah

4. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja menurut G.Sugioyarso dan f.Winarni (2005:158) adalah sebagai tingkat pencapaian hasil dan tujuan perusahaan atau instansi, tingkat pencapaian misi perusahaan atau instansi, tingkat pencapaian pelaksana.

b. Tujuan pengukuran kinerja

Menurut Abdul Halim (2001:353) dalah untuk memotivasi personel dalam pencapaian sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuat tindakan hasil yang ingin dicapai organisasi.

c. Manfaat pengukuran kinerja

Menurut Abdul Halim (2000:208) pengukuran kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk:

- 1) Mengelolah operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- 2) Membantu mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan yang mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja.
- 5) Mereka menyediakan suatu dasar distribusi penghargaan

d. Aspek yang di ukur dalam kinerja

Menurut Indra Bastian dan Gatot Suprianto (2002:239) ada beberapa yang di ukur dalam pengukuran kinerja :

- 1) Aspek finansial
 - 2) Aspek kepuasan pelanggan dan masyarakat
 - 3) Operasi dan pasar internal
 - 4) Kepuasan pegawai
- e. Teknik dan pengukuran kinerja

Menurut Indra Bastian dan Gatot Suprianto (2002:445) pengukuran kinerja dibedakan empat skala yaitu :

- 1) Skala nominal
 - 2) Skala ordinal
 - 3) Skala interval
 - 4) Skala rasio
- f. Hubungan rasio keuangan dengan kinerja

Rasio keuangan APBD dapat menilai tingkat ketercapaian hasil kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Alat ukur finansial ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat kinerja finansial dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kerja yang telah terjadi. Analisis atas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan objek analisis yang digunakan sebagai sumber data dalam menentukan pengendalian kerja finansial.

Analisa rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode

sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disinilah dapat dilihat hubungan antara rasio keuangan dengan penilaian kinerja atas setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam tahun anggaran. Maka dari itu pemerintah daerah yang diserahi tugas dalam menjalankan roda pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efesensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- 4) Melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut sugiyono (2006:10:11) ditinjau dari tingkat eksplanasia ada 3 macam yaitu:

1. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indefenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antra variabel satu dengan yang lain.

2. Penelitian komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabel masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dau variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui analisis APBD dengan menggunakan rasio keuangan pada pemerintah kota Pagar Alam

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Pagar Alam yang beralamat Jalan Laskar wanita Mentarjo, Kota Pagar Alam.

Kota Pagar Alam yang kantoraan Gunung Gare

C. Operasionalisasi variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini

bagai berikut

Tabel II
Operasionalisasi Variabel

N0	variabel	Sub variable	Devenisi	indikator
1	Rasio keuangan	Rasio kemandirian	Rasio yang menunjukkan kemampuan dalam pembiayaan sendiri pemerintah	Pendapatan asli daerah
		Rasio efektivitas	Rasio yang menunjukkan yang digunakan untuk PAD	Realisasi penerimaan PAD dibandingkan target penerimaan
		Rasio efisensi	Rasio yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya dikeluarkan memperoleh pendapatan	Biaya yang dikeluarkan oleh PAD dibandingkan realisasi penerimaan PAD
		Rasio keserasian	Rasio yang memprioritaskan alokasi dana pada belanja dan bangunan	Total belanja rutin dan total belanja bangunan dibandingkan total APBD

Sumber penulis, 2010

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang Supono (2004:146) di lihat dari cara memperoleh data terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media pelantara (diperoleh melalui dan dicatat orang lain).

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer berupa :

- a. Data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2006-2009
- b. Catatan tentang kegiatan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset kota pagarAlam
- c. Struktur organisasi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah
- d. Pembagian tugas dan fungsi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin W, Gulo (2006:116) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari respon tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara penelitian dan responden

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) adalah pernyataan yang disusun dalam bentuk kalimat tanya.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2003:32) analisis data terdiri dari

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus: seperti :Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan angka, tabel dan uraian mengenai analisa rasio keuangan APBD kinerja pemerintah kota Pagar Alam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran umum Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Kota Pagar Alam

Kota Pagar Alam merupakan salah satu Provinsi Sumatra selatan, letaknya disebelah Utara kabupaten lahat di bagaian selatan kecamatan tanjung sakti di bagian barat kabupaten lahat dan dibagian timur kabupaten lahat.

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Pagar merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah, pembentukan organisasi dan tata kerja pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan kewenangan. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kota Pagar Alam yang beralamat di jalan Laskar Wanita Menterjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam. Wilaya kerja dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pagar Alam meliputi kecamatan Dempo selatan, kecamatan Dempo Tengah, kecamatan Dempo Utara, kecamatan Pagar Alam selatan dan kecamatan Pagar Alam Utara

2. Struktur organisasi

a) **Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah**

Sebelum membahas lebih lanjut susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari dinas pendapatan, pengelolaan dan Aset Kota Pagar Alam.

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah merupakan wujud pelaksanaan Kota Pagar Alam dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Dimana Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonstralisasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mempunyai sebagai berikut :

- 1) Membantu dalam menentukan kebijaksanaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran

kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainya atas pelaksanaannya.

- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan.
- 3) Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.
- 4) Melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Kota Pagar Alam.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Pagar Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainya yang diserahkan oleh Bupati Kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b) Melakukan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
- c) Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Direktorat jendral pajak /derekrotat pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam

menyajikan dan menerima kembali surat pemberitahuan objek dari wajib pajak.

- d) Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- e) Membantu melakukan penyampaian surat pemberi tahuan pajak terhutang. Surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan saranan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada bahwa pengawasannya.
- f) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- g) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- h) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidang pendapatan penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan
- i) Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- j) Melakukan urusan ruimah tangga
- k) Mengumpulkan bahan penyusunan,perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah.
- l) Mengelola administrasi keuangan daerah dinas dan daerah kabupaten.
- m)Menguji kebenaran penagihan SPD dan pembina bendahara.

- n) Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dinas daerah.
- o) Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah.
- p) Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.
- q) Mensosialisasikan semua undang-undang, peraturan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah.
- r) Mengurus semua aset daerah dan memproses pemakaian /pemanfaatan.

b) Susunan organisasi

Susunan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam ditetapkan dalam keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dan peraturan daerah Kota Pagar Alam penyebaran tugas pokok dan fungsi dinas pendapat, pengelolaan keuangan dan dimana susunan organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing masing unit.aset daerah Kota Pagar Alam.

Adapun susunan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah kota Pagar Alam terdiri dari :



- 1) Kepala dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub bagian umum kepegawaian
 - b) Sub bagian keuangan
 - c) Sub bagian perlengkapan
- 3) Bidang Pendapatan Asli daerah, membawahi :
 - a) Seksi pendaftaran dan pendataan
 - b) Seksi penetapan,
 - c) Seksi penagihan
- 4) Bidang dana perimbangan dan penerimaan lainnya, membawahi :
 - a) Seksi bagi hasil pajak
 - b) Seksi bagi hasil bukan pajak
 - c) Seksi penerimaan lain-lain
- 5) Bidang anggaran membawahi :
 - a) Seksi pembukuan, penerimaan kas daerah
 - b) Seksi pengeluaran kas daerah
 - c) Seksi pelaporan
- 6) Bidang akuntansi dan pelaporan, membawahi :
 - a) Seksi pembukuan penerimaan dan pengeluaran
 - b) Seksi pengelolaan investasi daerah
 - c) seksi akuntansi bidang milik daerah
- 7) Bidang Aset daerah, membawahi :
 - a) Seksi analisa kebutuhan



- b) Seksi inventarisasi
 - c) Seksi pemeliharaan dan penghapusan
- 8) Bidang Perbendaharaan :
- a) Seksi Penata Usahaan dan Penerimaan Kas Daerah
 - b) Seksi Pengeluaran Kas Daerah
 - c) Seksi Pelaporan
- 9) Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

c) Tugas dan fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah adalah dan sebagai :

1) Kepala Dinas

Tugas :

kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- c) Pelaksanan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah.
- d) Pengelolaan kesekretariat meliputi, perencanaan umum dan keuangan.
- e) Pembinaan dan pelaksanan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f) Pelaksanan dan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Sekretariat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, program, kepegawaian, dan perlengkapan.

Fungsi :

- a) Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
- b) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan serta hubungan masyarakat
- c) Pelaksanan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan

Bagian sektariat terdiri dari

- a) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - (2) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat penyiapan masrakat rapat-rapat dinas dan dokumentasian kegiatan dinas.
 - (3) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran administrasi kepegawaian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas.
 - (4) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan
- b) Sub bagaian keuangan mempuyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
 - (2) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verivikasi dan pembukuan aggaraan keuangan
 - (3) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keunagan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
- c) Sub bagian perlengkapan mempuyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan

- (2) Melaksanakan urusan rumah tangga ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja
- (3) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor.
- (4) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana di lingkungan.

3) Bidang Pendapatan Asli Daerah

Tugas :

- a) Melakukan pendaftaran /pendapatan, penetapan dan penagihan yang berhubungan dengan pajak serta penerimaan dana bagi hasil pajak baik pusat maupun propinsi.
- b) Membuat perkiraan / asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah.
- c) Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.
- d) Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah.
- e) Melakukan penyuluhan pajak daerah dan pajak-pajak lainnya.

Fungsi :

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan objek dan subjek pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

- b) Menyelenggarakan tugas penagihan pajak daerah serta penerimaan lain sesuai dengan kewenangan.
- c) Menyelenggarakan tugas penyuluhan pengendalian dan pembinaan terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya.
- d) Menyelenggarakan kegiatan penghimpun data dan informasi pajak dan pendapatan lainnya.
- e) Penerbitan surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

- a) Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas :
 - (1) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan subjek / objek pajak dan retribusi serta PAD lainnya.
 - (2) Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Retribusi Daerah (NPWRD)
 - (3) Menghimpun dan memelihara data WP dan WR.
 - (4) Melakukan verifikasi lapangan terhadap data subjek dan objek WP dan WR.
 - (5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- b) Seksi penetapan, keberatan dan penghapusan mempunyai tugas :
 - (1) Menghitung dan menetapkan besarnya pajak dan retribusi

- (2) Menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi.
- (3) Menerbitkan dan mendistribusi serta mengarsipkan surat ketetapan pajak dan retribusi.
- (4) Memberikan nomor pajak dan retribusi.
- (5) Menerima dan memproses usul keberatan dan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi.
- (6) Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan.
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

c) Seksi penagihan mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penagihan pajak dan retribusi.
- (2) Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi.
- (3) Melaporkan hasil penagihan pajak dan retribusi.
- (4) Menyiapkan surat teguran dan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4) Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain

Tugas :

Bidang perimbangan dan penerimaan lain-lain mempunyai tugas rencana dan upaya pengikatan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.

Fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- b) Penghimpun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- c) Pelaksanaan kegiatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- d) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan maupun pencairan dana yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.
- e) Pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) – pajak bumi dan bangunan (PPB) kepada wajib pajak.

Bidang perimbangan terdiri dari :

- a) Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas :
 - (1) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil pajak.

- (2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB.
- (3) Melaksanakan kegiatan penggalihan potensi terhadap pendapatan yang bersumber dari penerimaan bagi hasil pajak.
- (4) Membantu Direktorat Jendral pajak dalam rangka penindistribusian SPPT-PBB kepada para wajib.
- (5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas :

- (1) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil bukan pajak.
- (2) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan bagi hasil bukan pajak
- (3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK serta menyiapkan surat permintaan pencairan dana yang berasal dari DAU dan DAK.
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5) Bidang Anggaran

Tugas :

Bidang tugas dan belanja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan di bidang Anggaran dan Belanja daerah.

Fungsi :

- a) penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang Anggaran pendapatan dan Belanja daerah.
- b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Anggaran pendapatan dan Belanja daerah.
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainya di bidang penyusunan dan pengelolaan Anggaran pendapatan belanja daerah.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang Anggran pendapatan belanja daerah.
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran pendapatan dan belanja daerah.

6) Bidang Akutansi, Investasi dan aset Daerah

Tugas :

- a) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan pembina penyelenggaran pencatatan / pembukuan dan pelaporan target / ketetapan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD.

- b) melaksanakan pencatatan / pembukuan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan.
- c) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan /pengelolaan data barang-barang milik daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun barang milik daerah.
- d) Penelitian dan pengevaluasian realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- e) Penyiapan bahan rangka penyusunan pertanggung jawaban APBD.
- f) Penyiapan bahan dalam rangka rapat evaluasi penerimaan pertanggungjawaban daerah.

Fungsi :

- a) Malaksanakan pencatatan semua transaksi APBD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Melaksanakan pencatatan barang milik daerah melalui proses sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

7) Bidang Aset Dearah

Tugas :

Bidang Aset Dearah mempuyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pemeliharaan, pendistribusian dan penghapusan aset daerah.



Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah.
- b) Pengkoordinasian, pengarahan dan pembina penyelenggaraan inventarisasi /pengelolaan data aset daerah (barang milik daerah) sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah.
- c) Pelaksanaan pencatatan aset daerah melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta membuat neraca daerah sebagai dari laporan keuangan daerah.
- d) Penghimpun, pengidentifikasian data nominal barang-barang milik daerah /kekayaan daerah sebagai bahan informasi pencacatan aset daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- e) Pencacatan dan pembukuan semua tindakan penyusunan administrasi yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan / barang milik daerah setiap tahun anggaran berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
- f) Penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- g) Penyusunan kebijakan standar pengelolaan aset daerah dan pedoman penghapusan barang milik daerah.
- h) Pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

- i) Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

- a) Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai tugas :

- (1) Membuat daftar rencana dan menganalisa rencana kebutuhan aset daerah.
- (2) Menetapkan pedoman, sasaran dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang.
- (3) Melakukan administrasi perencanaan dan penentuan kebutuhan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mengkoordinasikan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadai barang / jasa.
- (5) Mengumpulkan dan menghimpun data informasi serta mengikuti perkembangan harga dalam rangka menyusun harga pokok setempat.
- (6) Membuat pedoman dan informasi tentang harga pokok setempat.
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugasnya.

- b) Seksi Inventarisasi mempunyai tugas :

- (1) Melakukan inventarisasi aset daerah

- (2) Menyusun daftar inventarisasi aset daerah dan menyusun data dasar neraca aset daerah.
 - (3) Melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang inventarisasi aset daerah sesuai dengan pengaturan perundang-undang.
 - (4) Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang inventarisasi /aset daerah dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Mengkoordinir laporan aset daerah dari SKPD.
 - (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- c) Seksi pemeliharaan dan penghapusan mempunyai tugas :
- (1) Menyimpan, memelihara dan melengkapi seluruh dokumen /buku sah kepemilikan aset daerah.
 - (2) Melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah agar berdaya guna.
 - (3) Melaksanakan perubahan status hukum barang inventarisasi daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan.
 - (4) Menyusun dokumen, prosedur dan melaksanakan penghapusan aset daerah.
 - (5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

8) Bidang Perbendaharaan

Tugas :

- a) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan penata usahaan.
- b) Menyiapkan SPD (surat penyediaan dana) menyiapkan SP2D (Surat pemerin tah pencaiaran dana).
- c) Mermeriksa dan meneliti berkas SPM (Surat pemerintah membayar)berserta kelengkapan yang disampaikan oleh SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) serta pembina penata usahaan keuangan SKPD.
- d) Pengkoordinasian dan pembina teknis penyelenggraan penata usahaan keuangan daerah dibidang bendaharaa.
- e) Pelaksanaan penerimaan, menyimpan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah.
- f) Penyiapan anggaran kas, penyusunan laporan arus kas serta pengendalian pengeluaran kas daerah.
- g) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun pembiayaan daerah.

- a) Mengkoordinasikan serta membina ketatausahaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas maupun membiayai daerah.
- b) Menguji kebenaran penagihan SPM dari setiap SKPD, menyiapkan SPD dan SP2D serta menyiapkan anggaran kas.
- c) Menunjukan bank operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah.
- d) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- e) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- f) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolah / menatausahakan investasi daerah.
- g) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- h) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- i) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah.

9) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Tugas :

- a. Menggali dan mendata setiap adanya objek pajak yang baru baik PBB maupun pajak daerah.

- b. Sebagai koordinator penyampaian PBB.
- c. Sebagai koordinator pemungutan PBB dan PAD.

4. Tata Kerja Dinas, Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tata kerja yang terdapat didalam oeraganisasi Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah Kota Pagar Alam sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpin.
- b. Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dilingkungannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkorinasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- c. Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan dinas daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya seta mengambil langka-langka sesuai perturan perundang –undangan yang berlaku bila terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawahannya.

- d. Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan dinas daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan secara berjenjang.
- e. Setiap laporan diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- f. Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.
- g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- j. Menyajikan data-data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca.

5. Hubungan Rasio Keuangan dengan Kinerja.

Rasio keuangan APBD dapat menilai tingkat ketercapai hasil kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Alat ukur finansial ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat kinerja finansial dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kerja yang telah terjadi. Analisis atas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan objek analisis yang digunakan sebagai sumber data dalam menentukan pengendalian kerja finansial. Berikut data realisasi anggaran penerimaan APBD kota Pagar Alam.

Tabel IV.1
Data Realisasi Selisih Lebih Anggaran
Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2006 s/d 2009
dalam ribuan rupiah (00000)

No.	Keterangan	2006	2007	2008	2009
1	Pendapatan Daerah				
	PAD	12.749,320	25.845,450	29.504,970	31.877,920
	Dana perimbangan	391.744,960	465.562,420	684.610,570	879.332,920
	Lain-lain				
	Pendapatanyang sah	11.943,000	7.814,000	48.133,320	40.814,530
	Total pendapatan daerah	416.436.280	499.221,870	762.248,860	952.025,180
2	Belanja daerah				
	Belanja operasi	60.377,110	120.563,930	393.593,700	485.026,430
	Belanja modal	310.252,640	302.793,650	393.779,240	446.783,640
	Belanja tak terduga	965.620	636.780	551.610	1.085,520
	Total belanja	371.595,170	423.994,360	790.924,550	932.895,590
3	Pembiayaan penerimaan				
	Sisa lebih perhtungan thn lalu	60,101,060	98.179,880	174.288,740	138.778,910
	Jumlah penerimaan				
	Pengeluaran daerah	60.101,000	98.179,880	174.288,740	138.778,910
	Peryertaan modal				
	Program gerbang serasan	1.000,000	2.500,000	2.804,000	14.107,910
	Pembayaran utang pokok		1.000,000		
	jth tempo	336.170	207.390	276.050	276.670
	Sisa lebih perhitungan				
	anggaran tahun berjalan	103.606,000	169.700,000	142.533,000	105.264,850
	Jumlah pengeluaran	104.942.170	173.407,390	145.613,050	119.649,320
	Surplus/ Devisit	44.841,110	75.227,510	(28.675,690)	(19.129,590)

Sumber :Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Adet Daerah

B. Analisis dan Pembahasan

Wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai otonomi daerah, yang mana dalam rangka ini menyelenggarakan rumah tangga daerah yang berprinsip ke arah terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, sejalan dengan pesatnya pembangunan di kota Pagar Alam tentu memerlukan dana yang tidak sedikit dimana selanjutnya perkembangan tugas Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah ini, menimbulkan suatu pemikiran pemerintah untuk mengali, mengelola dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Secara garis besar dibahas pada bab ini yaitu menganalisis mengenai rasio keuangan untuk menilai kinerja pemerintah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai otonom daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Adapun analisis rasionya terdiri dari : Analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio efektivitas dan efisiensi, dan analisis rasio keserasian. Berikut ini disajikan beberapa tabel dan perhitungan sebagai berikut.

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan dan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman.

Tabel IV.2
Data PAD dan Dana perimbangan pada APBD
Tahun 2006 s/d 2009
Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	2006	2007	2008	2009
PAD	12.749,32	25.845,45	29.504,97	31.877,92
Dana perimbangan	391.744,96	465.562,42	684.610,57	879.332,73
Rasio Kemandirian	0,032 atau 3,2%	0,055 atau 5,5%	0,043 atau 4,3%	0,036 atau 3,6%

Untuk mencari Rasio Kemandirian dapat digunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Berdasarkan tabel IV.2 terlihat bahwa PAD dan dana perimbangan mengalami peningkatan dan ada juga penurunan dari tahun ke tahun. Peningkatan pada PAD dikarenakan kenaikan penerimaan –penerimaan

bagi laba BUMN, pajak daerah, retribusi daerah dan juga pendapatan pendukung PAD lainnya, sedangkan sumber pendapatan dari pihak ekstern meningkat karena terjadinya peningkatan pada pos-pos dan perimbangan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak.

PAD yang semula ditahun 2006 Rp. 12.749,32 2007 menjadi RP. 25.845,45 2008 menjadi RP. 29.504,97 dan pada tahun 2009 PAD yaitu sebesar 31.877,92. Sumber dari dana perimbangan pada tahun 2006 sebesar Rp. 391.749,32, mengalami kenaikan menjadi Rp. 465.562,42, pada tahun 2008 sebesar Rp. 684.610,57 dan pada tahun 2009 sebesar Rp.879.332,73. Pada rasio Kemandirian mengalami penurunan. hal ini dapat di lihat pada tahun 2006 Rasio kemandirian mencapai 3,2%, pada tahun 2007 naik menjadi 5,5%, pada tahun 2008 mengalami penurunan 4,3%, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali 3,6%.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio kemandirian selama empat tahun pada Kota Pagar Alam memiliki rata-rata kemandirian yang sangat rendah atau termasuk belum mandiri dan katagori daerah yang belum mampu membiayai rumah tangganya sendiri karena rasio kemandirian <50%, yaitu dengan peranan pemerintah pusat sangat dominan pada daerah. Ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang masih sangat rendah mengakibatkan kemampuan keuangan Kota PagarAlam masih sangat bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian yang masih rendah disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya PAD yang masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah, hal ini dikarenakan masih relatif rendah basis pajak / retribusi yang ada di daerah dan kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk PAD yang masih dikuasi oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat juga, yang dalam pemungutan berdasarkan undang-undang / peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta menerima bagian dalam bentuk dan perimbangan. Dampak perimbangan itu sendiri terdiri dari : bagi hasil pajak/ bukan pajak, dan bantuan propinsi. Agar kemandirian daerah semakin kuat atau naik maka pemerintah daerah Kota Pagar Alam harus berusaha meningkatkan lagi pendapatan asli daerah dengan cara :

- a. Melakukan evaluasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahun.
- b. Melakukan perbaikan terhadap peraturan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.
- d. Melakukan pengawasan terhadap aparat keuangan, dalam hal ini khususnya para pemungut untuk lebih baik lagi dalam pemungutan daerahnya.



2. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut tabel 1V.3 Rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi Kota Pagar Alam.

Tabel IV.3
Data Biaya Target & Realisasi Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah
Tahun 2006 s/d 2009
Dalam Ribuan Rupiah

Jenis Penerimaan	2006		2007		2008		2009	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Daerah	1.847.050.000	1.749.080.000	4.470.080.000	6.105.960.000	3.977.500.000	6.577.920.000	4.884.250.000	7.596.380.000
Retribusi Daerah	4.491.970.000	6.340.320.000	5.587.280.000	7.309.100.000	6.662.430.000	7.698.810.000	7.620.850.000	9.875.660.000
Jumlah	6.339.020.000	8.089.400.000	10.057.360.000	13.415.060.000	10.639.930.000	14.276.730.000	12.505.100.000	17.472.040.000
Biaya Pemungutan		556.670.000		1.164.900.000		456.420.000		1.128.320.000
Rasio Efektivitas		1,276 Atau 127,6%		1,334 Atau 133,4%		1,341 Atau 134,1%		1,397 Atau 139,7%
Rasio efisiensi		0,06 Atau 6,0%		0,08 Atau 8,0%		0,07 Atau 7,0%		0,06 Atau 6,0%

Untuk mencari rasio efektifitas dapat digunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Untuk mencari rasio efisiensi dapat digunakan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Dari perhitungan rasio diatas, dapat dikatakan bahwa rasio efektifitas pada anggaran Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemerintah Kota Pagar Alam rata-rata sudah efektif. Berdasarkan standar rasio efektifitas minimal 1 (satu) atau 100% hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan dan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun dan persentase perbandingan antara realisasi dan target yang dicapai rata-rata meningkat untuk empat tahun ini cukup baik, tahun 2006 sebesar 127,6%, kemudian 2007 meningkat sebesar 133,4% , tahun 2008 sebesar 134,1%, dan 2009 sebesar 139,7%. Rasio efisiensi pada anggaran Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam sudah baik walupan mengalami penurunan, Pada tahun 2006 sebesar 6,0%, tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 8,0% dan 2008 mengalami penurunan sebesar 7,0%, tahun 2009 mengalami penurunan kembali sebesar 6,0%.

Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efisiensi ini perlu disandingkan dengan rasio efektifitas yang dicapai oleh pemerintah daerah, dari perhitungan diatas terlihat bahwa kinerja pemerintah Kota

Pagar Alam sudah baik, agar rasio efektivitas dan efisiensi lebih baik maka pemerintah daerah harus melakukan :

1. Dalam penentuan / penerapan anggaran harus digunakan pada potensi yang ada.
2. Diusahakan biaya pemungutan dibawah 5%

3. Analisis Rasio Kecerasan

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja rutin (Belanja Aparatur daerah) dan belanja pembangunan (Belanja Pelayanan Publik) secara optimal. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamasi kegiatan pembangunan dan besarnya yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranannya pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar, oleh karena itu rasio belanja pembangunan yang masih relatif kecil perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Berikut ini tabel 1V.4 rasio kecerasan pada APBD Kota Pagar Alam :

Tabel 1V.4
Data Belanja Daerah Pada APBD
Tahun Anggaran 2006 s/d 2009
Dalam Ribuan Rupiah

N	Keterangan	2006	2007	2008	2009
1	Belanja daerah				
	Belanja rutin	60.377,11	120.563,93	393.593,70	485.026,43
	Belanja pembangunan	311.218,26	303.430,43	397.330,85	447.869,16
2	Total APBD	371.595,17	423.994,36	790.924,55	932.895,59
	Rasio belanja rutin	16,24%	28,43%	49,76%	51,99%
	Rasio belanja bangunan	83,76%	71,57%	50,24%	48,01%

Sumber : data yang sudah diolah

Untuk mencari hasil rasio belanja rutin dapat digunakan rumus :

$$\text{Rasio belanja Rutin Terhadap Anggaran} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Untuk mencari hasil rasio belanja bangunan dapat digunakan rumus :

$$\text{Rasio Belanja Terhadap Anggaran} = \frac{\text{Total Belanja Bangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Berdasarkan table 1V.4 terlihat bahwa rasio belanja rutin dan belanja pembangunan cukup stabil dari tahun ke tahun. dan semakin meningkat, pada tahun 2006 rasio belanja rutin dan belanja pembangunan sebesar 16,24%, dan 83,7%, sedangkan tahun 2007 rasio belanja rutin meningkat menjadi 28,43%, dan rasio belanja pembangunan mengalami

penurunan menjadi 71,57% ,tahun 2008 rasio belanja rutin dan rasio belanja bangunan mengalami peningkatan sebesar 49,76%, dan 50,24% tahun 2009 rasio belanja rutin meningkat menjadi 51,99% dan rasio belanja bangunan mengalami penurunan kembali.

Menurut uraian diatas bahwa dana yang dimiliki pemerintah kota Pagar Alam tidak hanya diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin saja tetapi juga untuk kebutuhan belanja pembangun ini dibuktikan dari rasio belanja rutin dan belanja pembangunan yang tidak mendominasi salah satunya dan tingkat pertumbuhan belanja rutin juga tingkat pertumbuhan belanja pembangunan. Begitu jauhnya selisih data belanja daerah antara rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan menggambarkan juga bahwa pemerintah mencoba meningkatkan pelayanan dan pendapatan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik serta dalam menyediakan sarana dan prasarana masyarakat juga sangat diperhatikan, yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang cukup baik.

Pada rasio ini belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diberikan dan saran yang diperlukan mengenai rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja Kota Pagar Alam maka penulis menarik kesimpulan.

A. Kesimpulan

1. Rasio keuangan APBD terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi dan rasio keserasian.
 - a. Rasio kemandirian dari APBD Kota Pagar Alam untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 menunjukkan hasil yang dikatakan sangat rendah bahkan menunjukkan hasil yang semakin menurun yaitu : 3,2%, 5,5%, 4,3% dan 3,6%. Dari hasil rasio kemandirian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pagar Alam belum mandiri berdasarkan kemampuan pemerintah membiayai sendiri pemerintahnya.
 - b. Untuk rasio efektivitas menunjukkan hasil yang cukup baik karena telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan persentase rasio efektivitas untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 adalah 127,6%, 133,45, 134,1% dan 139,7% serta rasio efisiensi menunjukkan persentase yaitu 0,6, 0,8, 0,7, dan 0,6.
 - c. Aktivitas pemerintah Kota Pagar Alam dilihat dari perspektif rasio keserasian dengan persentase rasio belanja rutin untuk

tahun 2006,2007,2008 dan 2009 adalah 16,24%, 28,43%, 49,76%, 51,99% serta rasio belanja pembangunan menunjukan 83,76%, 71,57%, 50,24% dan 48,01%.

Berdasarkan dari rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kinerja finansial cukup baik.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan hasil analisis di atas pemerintah kota Pagar Alam hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan hendaknya harus ditingkatkan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sumber yang telah ada sehingga kemandirian akan suatu daerah akan terpenuhi.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat keuangan, dalam hal ini khususnya para pemungut baik melalui pendidikan dan latihan administratif maupun yang bersifat teknis operasional.
3. Mengoptimalkan kerja tim intensifikasi khusus dalam rangka peningkatan pendapatan daerah secara efektif dan berkesenambungan guna memantau secara langsung kegiatan operasional pengelolaan pendapatan daerah di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Selemba Empat, Jakarta
- Indra Bastian dan Gatot Suprianto. 2003. **Sistem Akuntansi Publik**, Selemba Empat, Jakarta.
- Jumingan. 2005. **Analisis Laporan Keuangan**, PT. Bumi Akasara, Jakarta.
- Kadjadmiko. 2001. **Perhitungan dan Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) TA. 2002**, Rapat Kerja Teknik Keuangan 2001.
- Kuswadi. 2006. **Memahami Rasio-rasio Keuangan Bagi Awam**. PT. Tiex Media Komputindo Gramedia, Jakarta.
- Lin, Nan, alih Bahasa W. Gulo. 2000. **Metodologi Penelitian**, Cetakan ketiga, PT. Grasindo, Jakarta.
- Mardiasom. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Andi Yongyakarta, Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2003. **Materi Statistik**, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2004. **Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen**, BPFE, Yogyakarta.
- Sofyan Syafri Harapan. 2008. **Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan**, PT. Grapido Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kesembilan CV. Alfabeta, Bandung.
- Yuri Alfendri. 2009. **Analisis Rasio Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Untuk Menilai Efektivitas dan Efesiensi Pendapatan Daerah**, Skripsi Fakultas Ekenomi, (Tidak Dipublikasi).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : JULI HARTINI	PEMBIMBING
NIM : 22 2006 012	Drs. SUNARDI, S.E, M.Si
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA : MUHAMMAD FAHMI, S.E, M.Si
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	01/02 2011	Ka bab 4 dan 1,2,3.			Kinerja & Kinerja
2	04-02-11	Bab I. II. III			Pabul
3	16/02-11	Bab IV			
4	18/02-11	Bab IV			
5	19/02-11	Bab IV + V			
6	21/02-11	Bab III dan V			
7	22/02-11	Bab IV			Pabul.
8		Bab IV			
9		Bab V			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

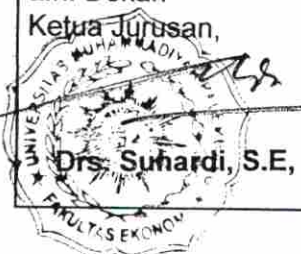
CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 22 / Feb / 2011

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Drs. Sunardi, S.E, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No 3450/D/T/2005
 No 3449/D/T/2005
 No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
 No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)
 No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004 (B)

Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Sabtu, 05 Maret 2011
 Waktu : 13.00 WIB
 Nama : Juli Hartini
 NIM : 22 2006 012
 Jurusan : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E., M.Si.	Pembimbing I	16-03-2011	
2	M. Fahmi, S.E., M.Si.	Pembimbing II	16/3/2011	
3	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Ketua Penguji	16 03 -2011	
4	Mizan, S.E., M.Si., Ak.	Anggota Penguji I	16 03 -2011	
5	Rosalina Ghazali, S.E., Ak. M.Si.	Anggota Penguji II	16 / Maret 2011	

Palembang, 16 Maret 2011

An. Dekan
 Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sunardi, S.E., M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

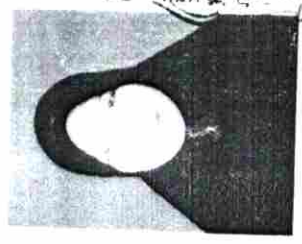
**NAMA : JULI HARTINI
NIM : 222006012
JURUSAN : Akuntansi**

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat CUKUP MEMUASKAN

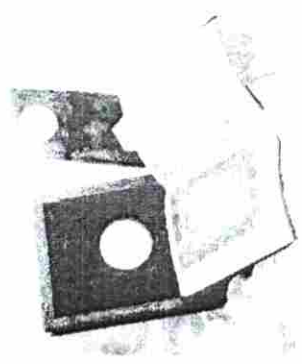
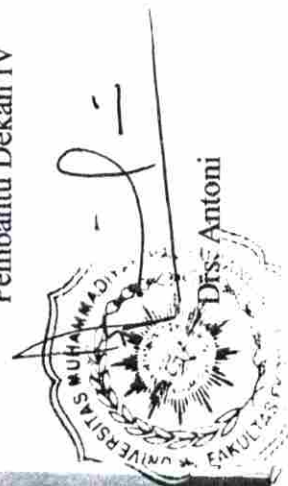
Palembang, 23 Februari 2011

an. Dekan

Pembantu Dekan IV



Unggul dan Islami





ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433 / 081958798699
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
JULI HARTINI	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	10-Nov-87	16-Feb-11

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
45	37	42	413

EXAMINEE'S NUMBER
22 2006 012

DATE OF REPORT
18-Feb-11



(Muhammad Fauzi, S.E., M.Si)
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

BIODATA PENULIS

Nama : Juli hartini
Tempat /tgl/lahir : Suban /10 November 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Alamat : Jl.Ahkadir
No.tlpn : 085268628873
Nama orangtua
Ayah : Jasarman
Ibu : Nilaiyanti
Pekerjaan orangtua
Ayah : Tani
Ibu : Ibu rumah tangga
Alamat orangtua : Desa Suban kec Tajung Sakti